

**NO SYARAT ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Dasar : Permendagri 57 Tahun 2017

- | | | |
|--------------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. | Surat Permohonan di tujukan ke Kepada Menteri Dalam Negeri u.p Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan tembusan Bupati Balangan yang di tanda tangani Pendiri dan Pengurus Ormas. |
| <input type="checkbox"/> | 2. | Salinan/Fotocopy Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). |
| <input type="checkbox"/> | 3. | Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) (memuat paling sedikit nama dan lambing, tempat kedudukan , asas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mikanesme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal dan pembubaran organisasi); |
| <input type="checkbox"/> | 4. | Program Kerja; |
| <input type="checkbox"/> | 5. | Susunan Pengurus (Stuktur Organisasi) |
| <input type="checkbox"/> | 6. | Surat Keputusan tentang susunan pengurus ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain serta pengurus dan anggota kesemuaannya berkewarganegaraan Indonesia tanpa Kecuali; |
| <input type="checkbox"/> | 7. | Biodata pengurus organisasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau Sebutan lainnya; |
| <input type="checkbox"/> | 8. | Pas Photo Pengurus Organisasi berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau Sebutan Lainnya); |
| <input type="checkbox"/> | 9. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau Sebutan Lainnya); |
| <input type="checkbox"/> | 10. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas; |
| <input type="checkbox"/> | 11. | Surat Keterangan Domisili Sekretaris Ormas yang di terbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; |
| <input type="checkbox"/> | 12. | Bukti Kepemilikan ata surat Perjanjian kontak atau izin pakai dari pemilik atau pengelola; |
| <input type="checkbox"/> | 13. | Foto Kantor atau Sekretariat Ormas, Tampak Depan dengan memuat papan nama |
| <input type="checkbox"/> | 14. | Surat Pernyataan |
| <input type="checkbox"/> | 15. | Formulis isian Data Ormas; |
| <input type="checkbox"/> | 16. | Rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan Bidang Keagamaan; |
| <input type="checkbox"/> | 17. | Rekomendasi dari Kementerian dan/atau perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki khusususan bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa; |
| <input type="checkbox"/> | 18. | Surat Pernyataan Kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara,pejabat Pemerintah dan/atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas; |
| <input type="checkbox"/> | 19. | SKT lama yang asli; |

NO SYARAT ADMINISTRASI PERSYARATAN MELAPOR KEBERADAAN ORMAS

Dasar : Permendagri 57 Tahun 2017

1. Surat Pengantar ditujukan kepada Bupati Balangan u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas;
2. Fotocopy
 - SKT (Surat Keterangan Terdaftar) tingkat pusat (DPP); atau
 - Fotocopy SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Salinan / fotocopy Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Program Kerja;
5. Susunan Pengurus (Struktur Organisasi);
6. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain serta pengurus dan anggota kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali;
7. Biodata pengurus organisasi
 - Ketua
 - sekretaris
 - bendahara
8. Pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
 - ketua
 - sekretaris
 - bendahara
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi
 - Ketua
 - sekretaris
 - bendahara
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ormas;
11. Surat Keterangan Domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
12. Bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak / izin pakai dari pemilik atau pengelola;
13. Foto Kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
14. Surat pernyataan;
15. Rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
16. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
17. SKT lama yang asli